



UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES REKONSILIASI DAMAI KAMBOJA 1982—1991

SKRIPSI

PRISCA PRIMA WIDYA

070404036X

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

DESEMBER 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES REKONSILIASI DAMAI KAMBOJA 1982—1991

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

PRISCA PRIMA WIDYA

070404036X

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

DESEMBER 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

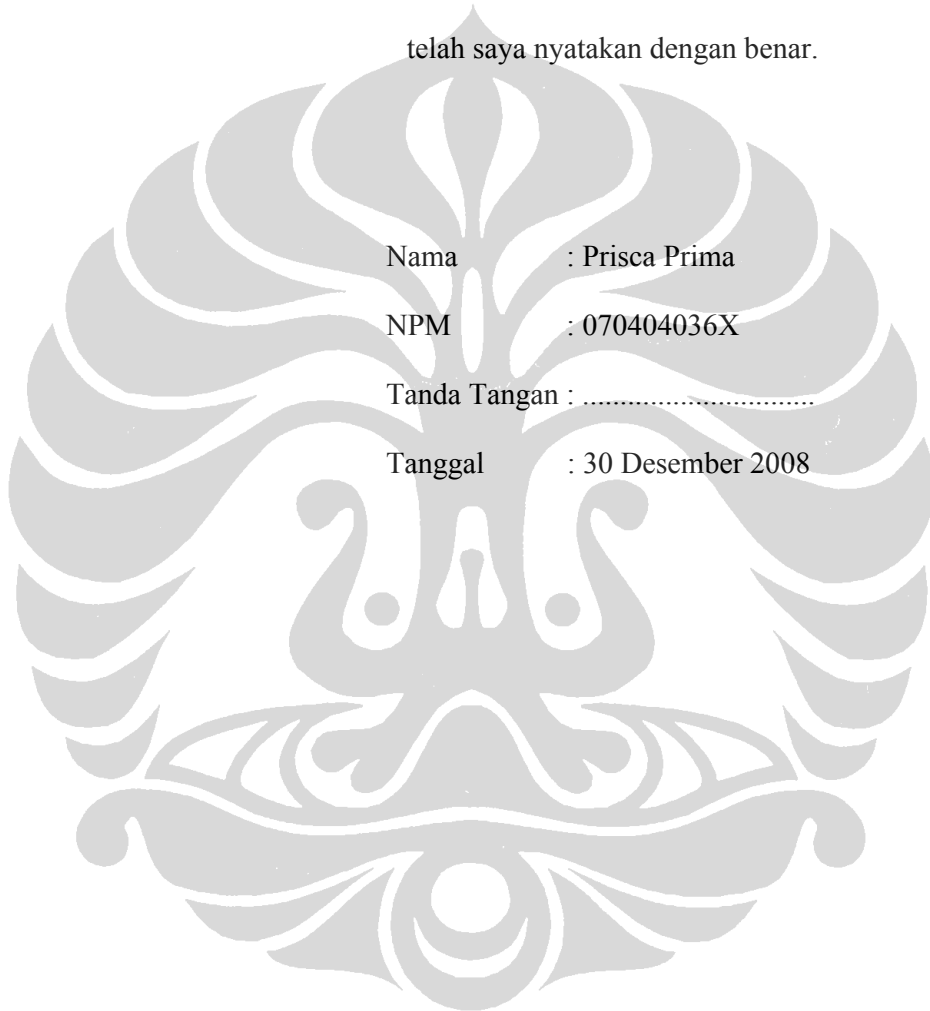
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Prisca Prima

NPM : 070404036X

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Desember 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Prisca Prima Widya
NPM : 070404036X
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Proses Rekonsiliasi Konflik Kamboja 1982—1991

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Linda Sunarti, M.Hum ()
Pembimbing : Dra.MPB Manus ()
Penguji : Wardiningsih, Ph.D ()
Penguji : Abdurakhman, M.Hum ()

Ditetapkan di : Depok, Universitas Indonesia

Tanggal : 30 Desember 2008

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 131 882 265

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya haturkan puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Atas berkat dan Karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi syarat dalam mencapai gelar sarjana humaniora di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi saya khususnya dan khalayak umum.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dan selesai sesuai rencana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Linda Sunarti M. Hum., selaku pembimbing pertama. Beliau selalu menyisakan waktu ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan sumbangan pikiran, bimbingan, dan pandangan serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini. “Terima kasih ya, mbak..!”. Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya haturkan kepada Ibu Dra. MPB Manus, selaku pembaca dan pembimbing kedua. Disela-sela waktu sibuknya, beliau masih sempat untuk membaca dan memberikan koreksi serta saran dalam penulisan skripsi ini.

Kepada Ketua Panitia Sidang Bapak Abdurakhman M.Hum, terima kasih atas saran dan kritiknya untuk menambah kelengkapan isi dari skripsi ini. Kepada Penguji Sidang Ibu Wardiningsih Soerjohardjo Ph.D, terima kasih atas saran dan masukannya yang sangat berharga yang sudah ibu berikan pada penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga saya sampaikan untuk seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang telah memberikan dan menyalurkan ilmu-ilmunya selama masa studi.

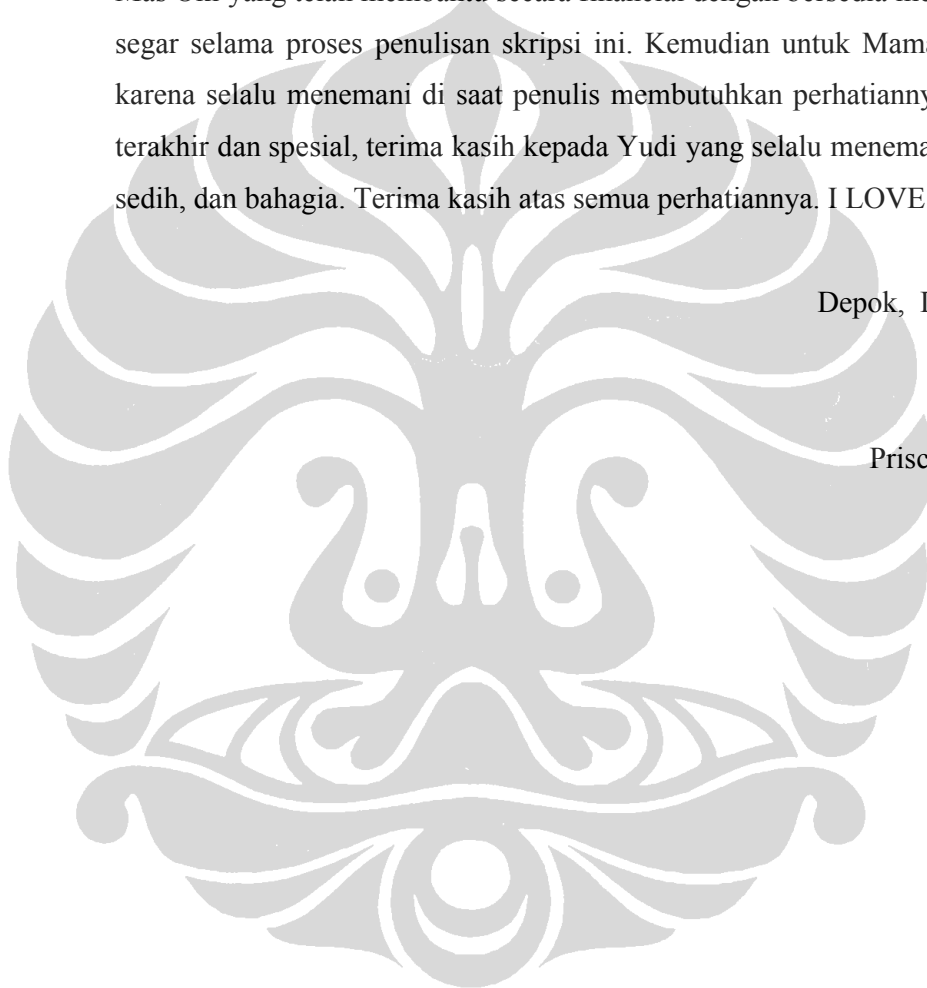
Kepada rekan-rekan di sejarah angkatan 2004: Adit, Ajay, Arief, Ari cewe, Ari cowo, Dien, Dimas, Dylan, Endang, Eha, Eli, Fikri, Franto, Gaby, Ivan, Martin, Mega, Marno, Mulya, Myrna, Ningrum, Prima, Riani, Sania, Sammy, Sulai, Vini, Wisnu, Yuda, dan Yunia Ningsih terima kasih telah mewarnai hari-hari dengan canda tawa bahkan derai air mata. Begitu pula untuk teman-teman senior angkatan 2003 (Inana, Lida, Juhe, Meli, Fathya, Diana, Yuli, Sepri, Mirza,

dan yang lainnya), terima kasih atas pertemanan yang menyenangkan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman setiakku, Milka, Stefi, dan Sylvia yang telah menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terbatas, saya sampaikan untuk Mama, Papa, dan Mas Oki, atas ketulusan doa, cinta, dan perhatian yang tiada henti baik secara moril, maupun materiil. Terutama untuk Mas Oki yang telah membantu secara financial dengan bersedia mengalirkan dana segar selama proses penulisan skripsi ini. Kemudian untuk Mama, terima kasih karena selalu menemani di saat penulis membutuhkan perhatiannya. Untuk yang terakhir dan spesial, terima kasih kepada Yudi yang selalu menemani di saat sulit, sedih, dan bahagia. Terima kasih atas semua perhatiannya. I LOVE U HONZ....

Depok, Desember 2008

Prisca Prima Widya



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisca Prima Widya
NPM : 070404036X
Program Studi : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PROSES REKONSILIASI DAMAI KAMBOJA 1982—1991

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Desember 2008

Yang menyatakan

(Prisca Prima Widya)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Istilah.....	xiii
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Tujuan Historiografi.....	12
1.7 Sumber Penelitian.....	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2. Sejarah Awal Kamboja.....	15
2.1 Letak Geografis dan Komposisi Penduduk Kamboja.....	15
2.2 Sejarah Kerajaan Kamboja.....	19
2.3 Kamboja Merdeka (1954—1970).....	27
2.4 Kamboja di Bawah Pemerintahan Khmer Merah (1975—1979).....	29
2.5 Invasi Vietnam atas Kamboja.....	33
BAB 3. Norodom Sihanouk dalam Proses Pembentukan the Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK).....	39

3.1 Keterlibatan Awal Pangeran Sihanouk dalam Konflik Kamboja	39
3.2 Keterlibatan Awal ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Kamboja (1979—1981)	46
3.3 Tiga Kelompok Perlawanan Kamboja anti-Vietnam	50
3.3.1 Khmer Merah	51
3.3.2 KPNLF	52
3.3.3 FUNCIPPEC	55
3.4 Peranan Norodom Sihanouk dalam Proses Pembentukan CGDK	57

BAB 4. Peranan Pangeran Norodom Sihanouk dalam the Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) untuk Proses Rekonsiliasi Damai Kamboja 1982 – 1991

4.1 Proses Awal Rekonsiliasi Kamboja, 1982—1987	74
4.1.1 Kursi CGDK di PBB, 1982	74
4.1.2 Legitimasi CGDK, 1983	80
4.1.3 Keadaan Tetap, 1984	84
4.1.4 Proposal Damai Pertama Kamboja yang Dikeluarkan Vietnam, 1985	87
4.1.5 Proposal Damai Pertama Kamboja yang Dikeluarkan CGDK, 1986	91
4.1.6 Pertemuan Pertama Sihanouk dan Hun Sen, 1987	93
4.2 Proses Lanjutan Rekonsiliasi Kamboja, 1988—1991	97
4.2.1 Pertemuan Kedua Sihanouk dan Hun Sen, 1988	97
4.2.2 <i>Jakarta Informal Meeting I (JIM I)</i> 1988	100
4.2.3 <i>Jakarta Informal Meeting II (Jim II)</i> 1989	105
4.2.4 <i>the First Paris Conference on Cambodia</i> , 1989	107
4.2.5 Usulan Australia	111
4.2.6 Pertemuan <i>Informal Meeting on Cambodia I</i> , 1990	112
4.2.7 Dokumen PBB	114
4.2.8 Pertemuan <i>Informal Meeting on Cambodia II</i>	115
4.2.9 Pertemuan-pertemuan SNC	116
4.2.10 <i>the Second Paris International Conference on Cambodia</i>	118

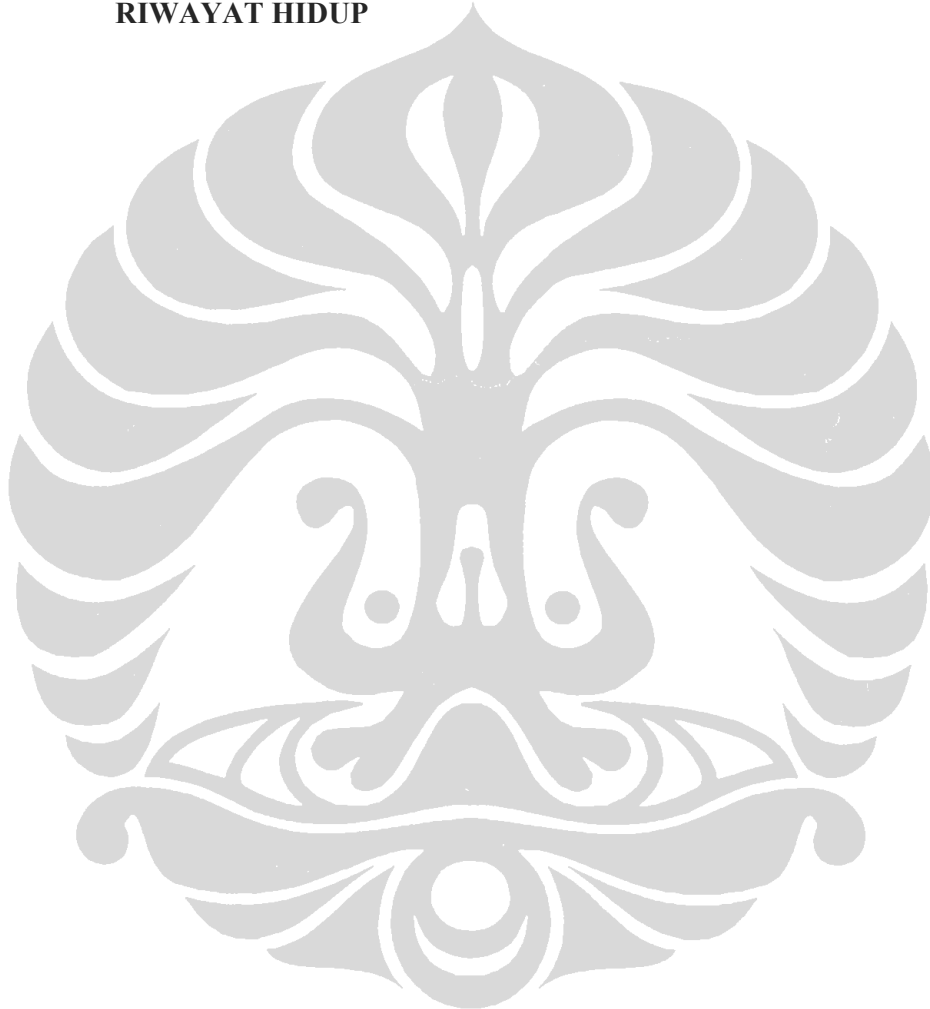
BAB 5. Kesimpulan.....120

Daftar Pustaka123

INDEKS

LAMPIRAN

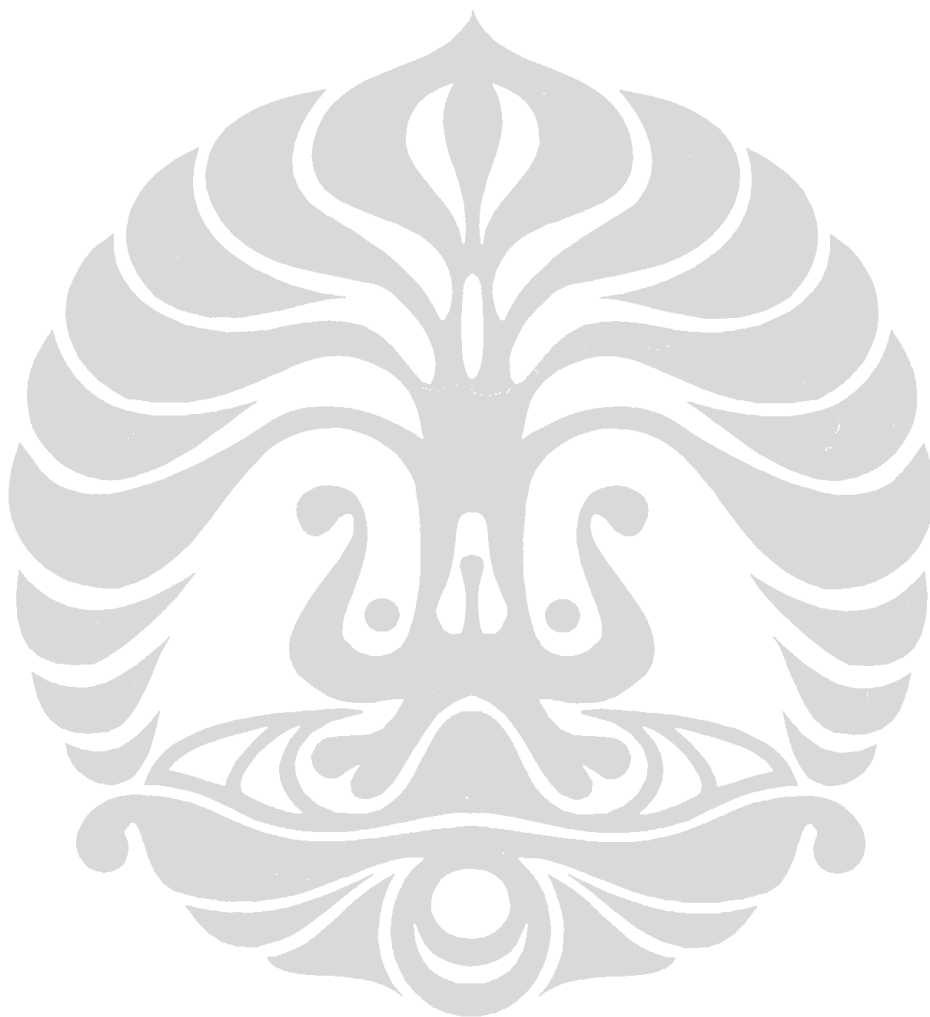
RIWAYAT HIDUP



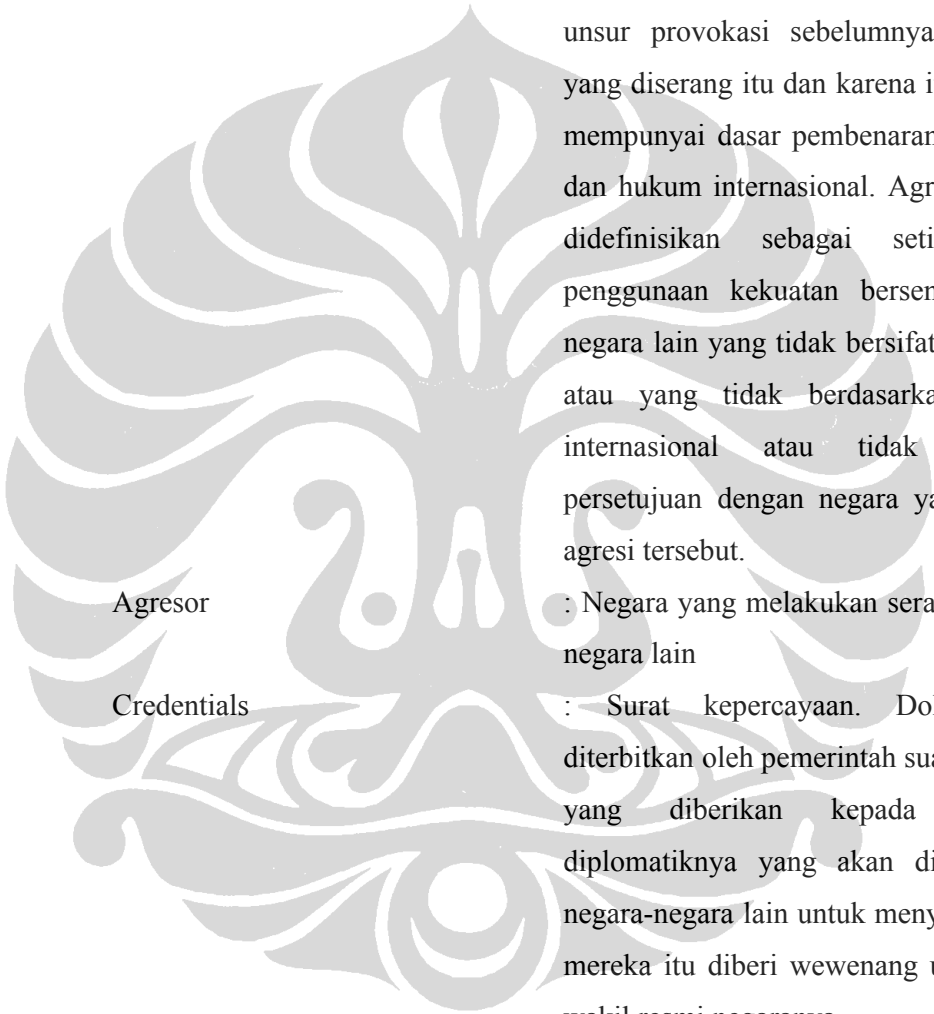
DAFTAR SINGKATAN

ACE	: <i>Association des Cambodiens a L'Etranger</i>
AFP	: <i>Agence France Presse</i>
AGKE	: <i>Association Genarale des Khmer a L'Etranger</i>
ANS	: <i>Armee Nationale Sihanoukienne</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CGDK	: <i>Coalition Government of Democratic Kampuchea</i>
CPK	: <i>Communist Party of Kampuchea</i>
DK	: <i>Democratic Kampuchea</i>
Dubes	: Duta Besar
FUNCIPEC	: <i>Front Uni National Pour un Cambodge Independent, Neutre, Pacifique et Cooperatif</i>
FUNK	: <i>Front Uni National du Kampuchea</i>
GRUNK	: <i>Gouvernement Royal d' Union National Kampuchea</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICK	: <i>International Conference on Kampuchea</i>
ICM	: <i>International Control Mechanism</i>
ICP	: <i>Indochinese Communist Party</i>
IMC	: <i>International Meeting on Cambodia</i>
JIM	: <i>Jakarta Informal Meeting</i>
KPNLAF	: <i>the Khmer People's National Liberation Armed Forces</i>
KPNLF	: <i>the Khmer People's National Liberation Front</i>
Menlu	: Menteri luar negeri
MOULINAKA	: <i>Mouvement Pour la Liberation Nationale du Kampuchea</i>
NADK	: <i>National Army of Democratic Kampuchea</i>
NGC	: <i>National Government of Cambodia</i>
NUFSK	: <i>National Union Front the Salvation of Kampuchea</i>
Parpol	: Partai Politik
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Pemilu	: Pemilihan Umum
PM	: Perdana Menteri

PRK	: <i>People's Republic of Kampuchea</i>
RI	: Republik Indonesia
Sangkum	: <i>Sangkum Reastyr Niyum</i>
SNC	: <i>Supreme National Council</i>
SOC	: <i>State of Cambodia</i>
UNTAC	: <i>United Nations Transitional Authority in Cambodia</i>



DAFTAR ISTILAH



Agresi	: Usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk merongrong kedaulatan politik atau keutuhan wilayah negara lain dengan cara-cara kekerasan dan sama sekali tidak ada unsur provokasi sebelumnya oleh negara yang diserang itu dan karena itu agresi tidak mempunyai dasar pembenaran secara moral dan hukum internasional. Agresi juga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang tidak bersifat membela diri atau yang tidak berdasarkan wewenang internasional atau tidak berdasarkan persetujuan dengan negara yang menderita agresi tersebut.
Agresor	: Negara yang melakukan serangan terhadap negara lain
Credentials	: Surat kepercayaan. Dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan yang diberikan kepada wakil-wakil diplomatiknya yang akan ditempatkan di negara-negara lain untuk menyatakan bahwa mereka itu diberi wewenang untuk menjadi wakil resmi negaranya
<i>Deadlock</i>	: Jalan buntu. Penolakan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan untuk membuat persetujuan atau kompromi yang lebih jauh karena menemui perbedaan pendapat
<i>De Facto</i>	: Berdasarkan kenyataan. Dalam hubungan internasional dikenal dengan pengakuan de

	facto, yaitu pengakuan terhadap suatu pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif di suatu negara atau wilayah
Deklarasi	: Pernyataan secara umum dan eksplisit
Ekspansi	: Suatu proses usaha untuk memperluas daerah kekuasaan dengan menganeksasi wilayah negara lain
<i>Ekspansionist</i>	: Suatu negara yang melakukan usaha perluasan wilayah kekuasaan
Faksi	: Suatu kelompok-kelompok di dalam suatu parpol yang juga mencakup para politisi yang mencoba menonjolkan diri
Gencatan senjata	: Penghentian tembak-menembak pada suatu peperangan untuk sementara waktu sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dengan jalan perundingan
<i>Genocide</i>	: Kehancuran manusia yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, ataupun latar belakang etnisnya
Hak Veto	: Suatu hak untuk membatalkan keputusan
Hegemoni	: Perluasan pengaruh yang lebih besar atau kontrol oleh suatu negara terhadap negara atau wilayah lain
Ideologi	: Artikulasi nilai-nilai politik, ekonomi, dan sosial yang dasar sebagai suatu kumpulan ide-ide yang dipakai sebagai landasan sistem sosial atau pandangan hidup yang diinginkan
<i>Infiltrasi</i>	: Penyusupan atau penyelundupan ke daerah musuh
Integritas teritorial	: Dalam hukum internasional, setiap negara berdaulat memiliki integritas teritorial

	artinya wilayah negara itu tidak boleh diganggu digugat oleh negara lain
Intervensi	: Campur tangan suatu negara terhadap masalah negara lain
Invasi	: Suatu kegiatan yang melakukan penyerbuan dan serangan ke negara lain yang merdeka dan berdaulat. Dengan kata lain, invasi adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara karena telah mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah negara yang diserang tersebut
Koalisi	: Gabungan orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersatu dalam satu badan atau kelompok; sering digunakan oleh pemerintah sementara dan gabungan militer untuk mengatur suatu tindakan dalam suatu krisis
Kudeta	: Pengambilalihan kekuasaan secara cepat oleh suatu kekuatan atau kelompok militer dari dalam sistem itu sendiri
Kolonialisme	: Usaha suatu negara untuk mendapatkan tanah atau wilayah dengan maksud untuk dikuasai atau menjadi daerah perluasan negara tersebut
Komunike	: <i>Communique</i> ; istilah ini biasanya digunakan di kalangan diplomatik dan menunjuk kepada pernyataan resmi yang dikeluarkan sesudah selesainya pertemuan-pertemuan diplomatik
Konferensi	: Pertemuan antara individu-individu atau antar kelompok untuk berkonsultasi dan berdiskusi atau saling tukar-menukar

	pandangan mengenai suatu masalah untuk menentukan kebijakan umum
Konsensus	: Persetujuan yang dicapai melalui kebulatan suara dan biasanya dicapai tanpa melalui voting
Konvensi	: Perjanjian internasional
Monarki konstitusional	: Kerajaan yang kekuasaan kepala negara (ratu atau rajanya) dibatasi oleh undang-undang
Netral	: Tidak memihak terhadap salah satu blok di dunia
Oposisi	: Kekuasaan suatu kekuatan sosial politik untuk mengawasi dan mengoreksi secara loyal tindakan dari kekuatan sosial politik yang memerintah
Pakta	: Persekutuan atau perjanjian antarbangsa
Perlucutan senjata	: Pembatasan besarnya kekuatan angkatan darat, laut, dan udara serta pengurangan jumlah dan jenis persenjataan dan perlengkapannya
Pemerintahan sementara	: Pemerintahan sementara dibentuk setelah jatuhnya suatu kabinet sampai terbentuknya kabinet yang baru
Portofolio	: Jabatan; menteri tanpa suatu departemen tertentu
Propaganda	: Tiap bentuk komunikasi yang ditujukan untuk menanamkan keterangan, gagasan atau gambaran pada pikiran orang lain dengan harapan dapat mempengaruhi pemikiran, emosi dan tindakan orang lain
Proktetorat	: Negara yang lemah tunduk pada negara yang lebih kuat dengan diatur melalui

	perjanjian yang telah disetujui oleh kedua negara tersebut
Power Sharing	: Pembagian kekuasaan
Resolusi	: Pengungkapan secara resmi, pendapat, kehendak ataupun pandangan suatu badan atau kelompok
Rezim	: Metode memerintah atau bentuk pemerintahan
Seminomadic	: Keadaan menetap namun, terkadang berpindah-pindah tempat
Status quo	: Keadaan tetap

